

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, didapatkan kesimpulan guna menjawab pertanyaan penelitian dan juga identifikasi masalah yang ada sebagai berikut :

1. Penyusunan skema sertifikasi Bhabinkamtibmas mencakup Hal sebagai berikut :
 - a. Latar Belakang: Skema sertifikasi ini dikembangkan untuk mengukuhkan kompetensi Bhabinkamtibmas, mempersiapkan personel dengan sertifikasi dari LSP Polri, yang sekaligus mendukung tugas dan pengembangan kurikulum serta meningkatkan daya saing.
 - b. Ruang Lingkup: Mencakup unit kompetensi dalam bidang keamanan, komunikasi, penyelesaian konflik, dan hukum, yang diuji untuk mencocokkan kemampuan personel dengan tuntutan lapangan.
 - c. Tujuan: Memastikan Bhabinkamtibmas memiliki kompetensi yang terjaga serta menyediakan acuan bagi LSP dan asesor.
 - d. Acuan Normatif: Berdasarkan regulasi UU No. 2/2002, Peraturan Kapolri No. 6/2017 (revisi 2022), dan pedoman dari BNSP dan Baharkam Polri, serta Binalattas untuk standar kompetensi.
 - e. Jenis Skema Sertifikasi: Skema ini adalah skema okupasi yang merinci unit-unit kompetensi dalam SK3 Bhabinkamtibmas.
 - f. Persyaratan Dasar: pemohon harus berpangkat minimal Briptu, memiliki pengalaman minimal satu tahun sebagai Bhabinkamtibmas, dan memenuhi berbagai persyaratan administrasi, fisik, mental, serta kinerja yang baik.

g. Hak dan Kewajiban:

Hak Pemohon: Mendapat informasi jelas tentang proses sertifikasi, sertifikat kompetensi jika lulus, dan hak mengajukan banding. Dan kewajiban Pemegang Sertifikat adalah mematuhi perjanjian dengan LSP, menjaga kompetensi, dan menjalani surveillance.

h. Biaya: Berdasarkan pedoman dari Polri dan BNSP, termasuk biaya langsung dan tidak langsung.

i. Proses Sertifikasi:

- 1) Pendaftaran: pemohon mengisi formulir, menyerahkan dokumen bukti dan APL.
- 2) Asesmen: dilakukan oleh asesor yang mengevaluasi kecukupan bukti, lalu merekomendasikan peserta untuk uji kompetensi jika memenuhi syarat.
- 3) Uji Kompetensi: menggunakan metode observasi, demonstrasi, dan lainnya, dilakukan di TUK yang diverifikasi LSP, dengan kriteria VATM.
- 4) Keputusan Sertifikasi: ditetapkan oleh tim teknis LSP, berdasarkan Berita Acara dan keputusan resmi.
- 5) Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat: Dilakukan jika terjadi pelanggaran, tindak pidana, atau hilangnya sertifikat.
- 6) Surveillance: dilakukan tahunan oleh LSP untuk memastikan kompetensi, dengan metode sampling dan catatan database.
- 7) Sertifikasi Ulang: Pemegang sertifikat harus mengajukan dua bulan sebelum masa berlaku habis, melalui asesmen portofolio, uji lapangan, atau kompetensi.
- 8) Penggunaan Sertifikat: pemegang wajib menjaga kredibilitas sertifikat dan mematuhi lingkup penggunaannya.

- 9) Banding: diajukan dalam satu hari jika peserta tidak puas, diproses oleh tim independen, dan hasil diumumkan dalam 14 hari kerja.

Dengan demikian, penyusunan skema sertifikasi Bhabinkamtibmas menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian dan menjamin bahwa personel memiliki kompetensi yang sesuai untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui sertifikasi ini, diharapkan tercipta Bhabinkamtibmas yang profesional, kompeten, dan siap menghadapi tantangan di lapangan.

B. Saran

1. Penelitian lanjutan dapat mengevaluasi efektivitas skema sertifikasi setelah diimplementasikan, dengan fokus pada dampaknya terhadap kinerja Bhabinkamtibmas di lapangan. Hal ini bisa mencakup analisis kinerja sebelum dan sesudah sertifikasi, serta tinjauan terhadap persepsi masyarakat.
2. Penelitian selanjutnya dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan skema sertifikasi, seperti dukungan manajemen, budaya organisasi, dan faktor sosial di lingkungan kerja Bhabinkamtibmas.
3. Penelitian ini dapat mengkaji kebutuhan kompetensi yang spesifik di berbagai wilayah Indonesia, mengingat perbedaan karakteristik dan tantangan di setiap wilayah. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menyusun kurikulum sertifikasi yang lebih kontekstual.
4. Studi lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana skema sertifikasi dapat diintegrasikan dengan pemetaan karier dan program pengembangan profesional berkelanjutan bagi Bhabinkamtibmas, untuk meningkatkan motivasi dan retensi personel.

5. Melakukan survei atau wawancara dengan masyarakat untuk memahami apakah sertifikasi Bhabinkamtibmas meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
6. Mengkaji potensi penggunaan teknologi seperti blockchain atau sistem manajemen pembelajaran (LMS) untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi proses sertifikasi. Hal ini juga dapat mencakup pengembangan platform sertifikasi online yang ramah pengguna.
7. Penelitian ini dapat mengeksplorasi pengaruh insentif atau penghargaan finansial dan non-finansial terhadap motivasi Bhabinkamtibmas dalam mendapatkan sertifikasi dan meningkatkan kompetensi.
8. Mengukur bagaimana sertifikasi memengaruhi indikator spesifik seperti penurunan tingkat kriminalitas, peningkatan kepuasan masyarakat, dan penurunan konflik di wilayah kerja Bhabinkamtibmas.
9. Mengembangkan dan menguji model pelatihan berkelanjutan yang dirancang untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi setelah sertifikasi, misalnya dengan program pembaruan sertifikasi atau pelatihan tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In P. Rapanna (Ed.), Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar (I, Vol. 6, Issue August). CV. Syakir Media Press.
- Adeosun, O. T., & Adegbite, W. M. (2023). Professional Certification and Career Development: A Comparative Analysis between Local and Foreign Certifications. *Management & Economics Research Journal*, 5(1), 1-14 <https://doi.org/10.48100/merj.2023.253>
- Arikunto, S. 2002. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Armstrong, M., & Taylor, S. (2023). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice* (16th ed.). Kogan Page.
- Barbuto, J. E. (2020). Professional Certification: Validating Competence and Enhancing Career Prospects. California State University
- Basri, H., & Umar, H. (2021). The Influence of Competence, Independence, and Audit Risks on the Auditor's Ability to Detect Corruption with Integrity as a Moderating Variable. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 3602-3614.
- Bintoro, R. F. A., & Fitrianto, Y. (2019). Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di Kalimantan Timur (Studi Kasus Di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Kabupaten Kutai Timur). *Jurnal Riset Pembangunan*, 2(1), 36-46.
- Bratton, J., & Gold, J. (2023). *Human Resource Management: Theory and Practice* (7th ed.). Palgrave Macmillan.
- Campbell, J. P., McCloy, R. A., Oppler, S. H., & Sager, C. E. (1993). *A Theory of Performance*. In N. Schmitt, W. C. Borman, & Associates (Eds.), *Personnel Selection in Organizations* (pp. 35-70). San Francisco: Jossey-Bass
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*(4th ed.). Sage Publications.

- Cumberland, D. M., Petrosko, J. M., & Jones, G. D. (2018). Motivations for Pursuing Professional Certification. *Performance Improvement Quarterly*, 31(1), 57-82. <https://doi.org/10.1002/piq.21256>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2021). *Public Administration: An Action Orientation* (9th ed.). Cengage.
- Dessler, G. (2023). *Human Resource Management* (17th ed.). Pearson.
- Dubois, D. D., & Rothwell, W. J. (2004). Competency-Based Human Resource Management. In Published by Davies-Black Publishing, a division of CPP, Inc., 1055 Joaquin Road, 2nd Floor, Mountain View, CA 94043; 800-624-1765 (first prin, Vol. 13, Issue 1). Published by Davies-Black Publishing a division of CPP, Inc., 1055 Joaquin Road, 2nd Floor, Mountain View, CA 94043; 800-624-1765.
- Fordham, S., & Martinez, M. (2005). Certification matters: The impact of certification on workplace performance. Alexandria, VA: HR Certification Institute.
- Frederickson, H. G., Smith, K. B., Larimer, C. W., & Licari, M. J. (2021). *The Public Administration Theory Primer* (4th ed.). Westview Press.
- Hollander, J.A. (2004). The social contexts of focus groups. *Journal of Contemporary Ethnography*, 33, 5, 602-637
- Horton, S., Hondeghem, A., & Farnham, D. (2002). Competency Management in the publik sector-what Competency Management in the French Civil Service? Competency, 123–134. Amsterdam • Berlin • Oxford • Tokyo • Washington, DC
- Ingham, J. (2007). *Strategic Human Capital Management* (First Edit). Elsevier.
- Iskandar, D., & Anriani, N. (2023). Kajian Dampak Sertifikasi Guru dan Pengajaran Berbasis Teknologi Informasi terhadap Kompetensi Guru: Literatur Review. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(2), 760-767. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i2.1662>
- Ivancevich, J. M., & Konopaske, R. (2013). *Resource Management Twelfth Edition*. Published by McGraw-Hill/Irwin, a business unit of The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York, NY, 10020.

- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Vokasi dan Produktifitas Nomor 2/1007/LP.00.00/V/2024 Tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Bhabinkamtibmas
- Keputusan Ketua BNSP Nomor: Kep 004/BNSP/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Polri
- Kettl, D. F. (2020). *The Transformation of Governance: Public Administration for Twenty-First Century America* (4th ed.). Johns Hopkins University Press.
- Kis, Sviatoslav, Mosora, Larysa, Mosora, Yurii, Yatsiuk, Oleh, Malynovska, Galyna and Pobihun, Serhii. "Personnel Certification as a Necessary Condition for Enterprise' Staff Development" *Management Systems in Production Engineering*, vol.28, no.2, 2020, pp.121-126. <https://doi.org/10.2478/mspe-2020-0018>
- Kompetensi Pustakawan Sebagai, Sertifikasi."Syarat kenaikan Jabatan fungsional pustakawan." *Libraria* 6, no. 2 (2018): 377.
- Krishnan, L.R.K., A Review of Certification as a Tool for Employee Development (June 2020). *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMPUTER APPLICATION & MANAGEMENT*, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4458957>
- Liem, P. (2017). *Sertifikasi Kompetensi: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Malik, A. (2018). *Strategic Human Resource Management and Employment Relations an International Perspective* (L. of C. C. N. 2018940781 & © (eds.)). Springer Texts in Business and Economics Ashish.
- Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2022). *Fundamentals of Human Resource Management* (9th ed.). McGraw-Hill.
- Øvrebø, L. J., Dyrstad, D. N., & Hansen, B. S. (2021). Assessment methods and tools to evaluate postgraduate critical care nursing students' competence in clinical placement. An integrative review. *Nurse Education in Practice*, 58, 103258. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2021.103258>
- Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Performance. Canada : John Wiley & Sons, Inc

Permana, Nana Surya. "Peningkatan mutu tenaga pendidik dengan kompetensi dan sertifikasi guru." *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan* 11.01 (2017): 1-8.

Rahmawati, E., Prasastono, N., & Suherman, S. (2022). Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Mice Antara Kebutuhan Dan Keharusan. *Media Bina Ilmiah*, 17(5), 857-874.

Ratnasari, Sri Langgeng, et al. "Dampak Sertifikasi dan Kompetensi terhadap Kinerja Dosen Tetap Yayasan di Kota Batam." *Journal of Applied Business Administration* 5.1 (2021): 25-33.

Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2020). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector* (9th ed.). McGraw-Hill.

S.Sugeng, Dwi Atmoko. "Strategi Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Hukum Melalui Skema Sertifikasi Profesi." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14.1 (2020): 163-182.

Saleh, at al. 2013. Pengembangan Kompetensi Sumber daya Aparatur. UB Press

Sedarmayanti. 2004. Good Government (Pemerintahan yang Baik). Bandung: CV. Mandar Maju.

Sedarmayanti. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Edisi Revisi, Cet. 5. Bandung: Refika Aditama.

Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at work: models for superior performance*.

Sriwidodo, U. .-. (2012). Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Komunikasi Dan Kesejahteraan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 4(1).

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.

- Supriyadi, S. (2016). *Manajemen Sertifikasi Kompetensi: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suryani, N. K., & Foeh, J. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Issue 2019)*. Nilacakra.[http://mfile.narotama.ac.id/files/Umum/JURNALUGM/Manajemen Sumber Daya Manusia.pdf](http://mfile.narotama.ac.id/files/Umum/JURNALUGM/Manajemen%20Sumber%20Daya%20Manusia.pdf).
- Taylor, F. F. (1919). *The Principles of Scientific Management*. Harper and Brothers Newyork and London.
- Uka, A. (2020). *Evaluasi dan Pengembangan Skema Sertifikasi di Sektor Pendidikan*. Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Zulpahmi, Z., Sumardi, S., Widyanto, B., Hamidah Sutilah, W., Nuraini, A., Aisyah Luthfiati, N., & Hidayat, F. (2023). Peningkatan Kompetensi Akuntansi Melalui Pelatihan Sertifikasi Akuntansi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 3(1), 63–70. <https://doi.org/10.35870/jpmn.v3i1.1001>

Nomor : 2033/STIA 1.1/PPS.02.3 Jakarta, 1 Agustus 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Tesis
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

**Yth. Bapak Roycke Harry Langle,
Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jl. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110**

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami;

Nama : Tri Setianingsih
NPM : 2344021022
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur
Judul Tesis : Pengembangan Skema Sertifikasi Bhayangkara Pembina
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

akan melakukan penelitian di instansi Bapak dalam rangka penyusunan tesis.

Sehubungan dengan itu, mohon kiranya Bapak berkenan memberi ijin dan membantu mahasiswa kami untuk mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Agustus 2024



Direktur



Murliah Nurdin, S.Sos., MA.

Tembusan:

1. Kasubdit Bhabinkamtibmas Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri;
2. Kajur/Sekjur Administrasi Publik;
3. Kaprodi/Sekprodi Program Magister Terapan;
4. Mahasiswa Ybs;
5. Peringgal.



BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI
KORPS PEMBINAAN MASYARAKAT
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 16 September 2024

Nomor : B/ 242 /IX/DIK.1.3/2024/Korbinmas
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : pemberitahuan pelaksanaan penelitian.

Kepada

Yth. DIREKTUR POLITEKNIK
STIA LAN

di

Jakarta

1. Rujukan:
 - a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nomor : 2033/STIA 1.1/PPS.02.3 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, disampaikan bahwa personel Subdit Bhabinkamtibmas Ditbinmas Korbinmas Baharkam Polri atas nama :
 - a. Nama : Tri Setianingsih;
 - b. NPM : 2344021022;
 - c. Jurusan : Administrasi Publik;
 - d. Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara;
 - e. Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur;
 - f. Judul Tesis : Desain Pengembangan Kompetensi Bhabinkamtibmas Melalui Sertifikasi.
3. Berkaitan dengan poin dua tersebut, disampaikan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian tesis pada Subdit Bhabinkamtibmas Ditbinmas Korbinmas Baharkam Polri pada tanggal 1 Agustus s.d 15 September 2024.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



PEDOMAN PENELITIAN

1. Ir. Muhammad Najib, MBA. *Jabatan Lead Asesor Lisensi* BNSP
 2. Kombes Pol Tatar Nugroho, S.I.K., S.H., *Jabatan Kasubdit Bhabinkamtibmas Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri*
 3. Kombes Pol. Edi Ciptianto, M.Si *Jabatan Kepala LSP Lemdiklat Polri.*
 4. AKBP Dr. Yuhernawa, S.H., M.H. *Jabatan Kasibinev Subdit Bhabinkamtibmas.*
 5. AKBP Theodolus Tri H, S.Pd. *Kasubbag Standarisasi LSP Lemdiklat Polri*
 6. Kompol Bandus Tira Wijaya *Jabatan Kasilatpuan Subdit Bhabinkamtibmas.*
-

1. Latar Belakang penyusunan Skema Sertifikasi Bhabinkamtibmas
2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi Bhabinkamtibmas
3. Tujuan Penyusunan Skema Sertifikasi Bhabinkamtibmas
4. Acuan Normatif Skema Sertifikasi Bhabinkamtibmas
5. Paket/Kemasan Kompetensi pada Skema Sertifikasi Bhabinkamtibmas
6. Jenis Kemasan (KKNI/ Okupasi Nasional/Klaster)
7. Nama Skema sertifikasi
8. Rincian Unit Kompetensi Bhabinkamtibmas
9. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi Bhabinkamtibmas
10. Hak Pemohon Sertifikasi
11. Kewajiban Pemegang Sertifikat
12. Biaya Sertifikasi
13. Proses Sertifikasi
14. Proses Pendaftaran
15. Proses Assesmen
16. Proses Uji Kompetensi
17. Keputusan Sertifikasi

18. Pembekuan dan pencabutan sertifikat
19. Pemeliharaan pemegang sertifikat / surveillance
20. Proses Sertifikasi Ulang / Perpanjangan
21. Penggunaan Sertifikat
22. Banding

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

1. Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Bhabinkamtibmas
2. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
3. Laporan kegiatan yang ada kaitannya dengan Bhabinkamtibmas
4. Bahan Ajar Bhabinkamtibmas
5. Buku pintar Bhabinkamtibmas
6. SOP Aktifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas